Dengan Dokumen	
Selesai	Belum di proses
Proses Akta Cerai Nomor 4130/AC/2019/PA.Sbr	Permohonan perjelasan tentang PPDB TA 2019-2020
Jalan Sunan Drajat No 1A	Jl. Nyi Mas Rara Kerta, Sitiwinangun, Jambiang, Sitiwinangun, Cirebon
Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A	SMKN1 Jamblang
Dusun 1 RT 003 Rw. 001 Desa Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon	KP. Tanda Barat RT. 03 RW. 06 Kel Kebon Baru Cirebon
Istianah Binti Dasuki	Toto Suharto
012/XI/KID.KC- PS/2019	3, 013/XII/KID.KC/PS/ 2019
12	5,

KOORDINASI DENGAN LEMBAGA PUBLIK SE KABUPATEN CIREBON



Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon berperan penting untuk mendorong tercapainya keterbukaan informasi di Kabupaten Cirebon dengan cara mendorong badan publik yang ada untuk memiliki Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), karena PPID ini adalah ujung tombak dari keterbukaan informasi yang ada.

Dalam kunjungannya KI memberikan Sosialisai tentang pentingnya UU KIP dalam era Keterbukaan ini Badan Publik harus merubah kesan tertutup yang selama ini ada dibayangan masyarakat karena UU KIP mewajibkan badan publik untuk jadi lebih terbuka sehingga masyarakat bisa aktif dalam menjalankan perannya dalam mengawasi pemerintahan yang ada untuk menghindari terjadinya asimetris informasi serta PPID harus lebih .

Diharapkan Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik¬baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Dalam diskusi ini membahas pula tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Publik kaitan tentang permohonan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat, tentang sengketa informasi publik.

Komisi Informasi telah melakukan Koordinasi kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun ini, dan akan meneruskan kegiatan tersebut di tahun yang akan datang, dengan harapan agar Badan Publik yang masih belum mengetahui tentang UU Keterbukaan Informasi Publik dapat memahami dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Tahunan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon ini disusun berdasarkan fakta serta informasi yang sebenarnya selama pelaksanaan kegiatan tahun 2019. Dengan disusunnya Laporan Tahunan ini diharapkan menjadi alat penilai kualitas kinerja dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian visi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon serta sebagai media pertanggungjawaban public sehingga Kinerja Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dapat bekerja lebih baik lagi. Penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan dimasa mendatang.

B. Saran

Untuk pelaksanaan Kinerja Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 pada umumnya seluruh kegiatan baik koordinasi dengan lembaga publik sudah sedikit demi sedikit dilaksanakan dan mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi telah dilaksanakan dengan baik. Namun kendalanya adalah masih belum seimbangnya antara rasio anggaran dengan beban tugas yang harus dilaksanakan, sehingga perlu ada supporting anggaran dengan memetakan program kegiatan yang belum teranggarkan atau optimalisai anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya. Dan juga dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Misalnya untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop dan semacamnya yang biasanya rutin diselenggarakan oleh KI Pusat dan juga masih perlu sosialisasi lebih intensive baik ke badan publik maupun masyarakat tentang keberadaan UU KIP dan Komisi Informasi beserta semua peraturan pendukungnya sehingga meningkatnya akselerasi kegiatan pelayanan informasi.

Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Ketua,

Drs. TATANG SUWARDI

Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon,

Drs. ERIS SUHENDI

Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon,

HMAD YUSRON, S.Sos., M.Si

Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon

TATI SUHARTI, SM.,HK.

Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon,

SAYIDI, S.Pd.I.

Dokumentasi Kegiatan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019



Sidang antara Pemohon Bapak Toto Suharto dengan RSUD Arjawinangun



Sidang Antara Pemohon KSM Tengah Tani LSM GMBI Cirebon Raya dengan Pemerintah Desa Battembat





Sidang Antara Pemohon Bapak Endi Rohaendi dengan Pemerintah Desa Kanci (Pemohon tidak pemah hadir)

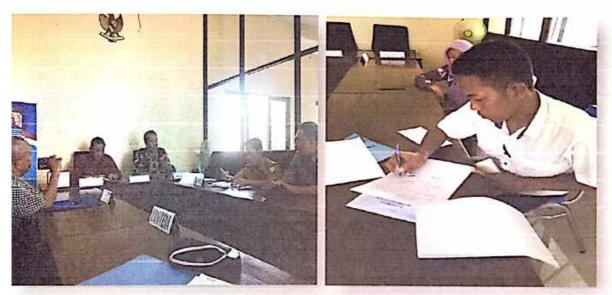




Sidang antara Pemohon Bapak Sukamo Mohamad Ace dengan Pemerintah Desa Wangunharja



Sidang antara Harian Umum Pelita News dengan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah VI Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat



Sidang antara Bapak Mulyana Sadja dengan Pemerintahan Desa Kalisari



Sidang antara Bapak Mulyana Sadja dengan BBWSCC



Sidang antara Ibu Istianah (diwakilkan dengan Bpk Mulyana sadja) dengan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A



Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kaitan UU KIP



Koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kaitan UU KIP





Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kaitan UU KIP







Kegiatan Pembinaan bagi SKPD se Kabupaten Cirebon













Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi Se- Indonesia di Pangkal Pinang









Kunjungan KI Provinsi Jawa Barat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik









Kunjungan KI Provinsi Jawa Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemeringkatan PPID